

***Policy Innovation Net Zero Emission: Partisipasi Masyarakat Jangka Panjang dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon***

**Roza Assabila Fatimatuz Zahra<sup>1</sup>, Muhammad Miftahul Huda<sup>2</sup>, Rupiarsieh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Bojonegoro, Indonesia

*rozaasabila@gmail.com<sup>1</sup>*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the level of long-term community participation in the Bojonegoro Carbon Emission Care Program by referring to Arnstein's Ladder of Citizen Participation theory (1969). This study uses a qualitative approach with a case study type to explore in depth the form of community involvement in environmental programs that focus on achieving the Net Zero Emission target. Data analysis was conducted using NVivo 12 Pro, which shows that community participation is predominantly at the Tokenism level, namely involvement provided by the government is formal and does not significantly influence the decision-making process. The results of the analysis show variations in the level of community participation, with the highest level of participation shown by Mr. Khafid (25%), followed by Mr. Choiri (24%), Mr. Edi (21%), and Mrs. Damai, Mrs. Suwiji, and Mr. Dedik (19% each). Lower levels of participation were seen in Mrs. Kasiati (18%) and Mr. Soehirman (14%). Tokenism's position is more stable than Non-Participation and Citizen Power, indicating that the community has been involved in various program activities, but does not yet have a strong space to determine policy direction or exert real influence on decisions made. This finding emphasizes the importance of the government's commitment to expanding more substantive participation through outreach, mentoring, and the establishment of inclusive collaborative mechanisms to support the achievement of Net Zero Emissions in Bojonegoro Regency.*

**Keywords :** *Community Participation, Tokenism, Bojonegoro Cares About Carbon Emissions.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat jangka panjang dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon dengan Merujuk pada teori *Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein (1969). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali secara mendalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam program lingkungan yang fokus pada pencapaian target *Net Zero Emission*. Analisis data yang dilakukan menggunakan NVivo 12 Pro, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dominan berada pada tingkat *Tokenism*, yaitu keterlibatan yang diberikan oleh pemerintah bersifat formal dan tidak secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat, dengan tingkat partisipasi tertinggi ditunjukkan oleh Bapak Khafid (25%), diikuti Bapak Choiri (24%), Bapak Edi (21%), serta Ibu Damai, Ibu Suwiji, dan Bapak Dedik (masing-masing 19%). Tingkat partisipasi yang lebih rendah terlihat pada Ibu Kasiati (18%) dan Bapak Soehirman (14%). Posisi *Tokenism* lebih menjadi stabil dibandingkan *Non Participation* dan *Citizen Power*, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam berbagai aktivitas program, namun belum memiliki ruang yang kuat untuk menentukan arah kebijakan atau memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan yang diambil. Temuan ini menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam memperluas partisipasi yang lebih substantif melalui sosialisasi, pendampingan, serta pembentukan mekanisme kolaboratif yang inklusif guna mendukung pencapaian *Net Zero Emission* di Kabupaten Bojonegoro.

**Kata kunci :** Partisipasi Masyarakat, *Tokenism*, Bojonegoro Peduli Emisi Karbon.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam jangka panjang pada Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon, yaitu program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BUMD PT Asri Dharma Sejahtera. Program ini merupakan kontribusi daerah terhadap pencapaian target global *Net Zero Emission* (NZE) sekaligus menjadi tanggapan terhadap peningkatan emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Keterlibatan aktif masyarakat diarahkan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan di Kabupaten Bojonegoro. *Net Zero Emission* menggambarkan kondisi ketika sisa emisi karbon tidak melebihi kapasitas serapan bumi, sehingga upaya pelestarian lingkungan dan transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih menjadi suatu keharusan. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat sebagai pelaku aktivitas sehari-hari menjadi faktor penting dalam pencapaian *Net Zero Emission* (Zahira & Fadillah, 2022).

Penelitian ini mengacu pada teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969), yang membagi partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkat, yaitu *Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control*. Delapan tingkat tersebut terkandung dalam tiga derajat utama, yaitu *Non Participation, Tokenism, dan Citizen Power*. *Non Participation* menggambarkan kondisi ketika masyarakat tidak dilibatkan dan pemerintah sepenuhnya menentukan proses pembangunan. *Tokenism* menunjukkan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk terlibat, namun keterlibatan tersebut bersifat simbolis dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Sementara itu, *Citizen Power* menandakan kondisi ketika masyarakat memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan serta mengawasi kinerja pemerintah secara efektif (Indriani et al., 2021). Teori ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat dalam program lingkungan, tidak hanya berdasarkan tingkat keterlibatan formal, tetapi juga berdasarkan sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan lingkungan dengan menggunakan kerangka *Ladder of Citizen Participation*. Indriani et al (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih didominasi oleh tingkat *Tokenism*, di mana masyarakat dilibatkan secara formal namun belum memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan Natalia dan Arbi (2025) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat yang lebih aktif berkontribusi positif terhadap keberhasilan program, terutama ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Erlina (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan program lingkungan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal dan pendampingan pemerintah. Namun demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis partisipasi masyarakat dalam program penurunan emisi karbon di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pencapaian *Net Zero Emission* dan keberlanjutan partisipasi jangka panjang, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon hadir sebagai tanggapan terhadap kerusakan lingkungan akibat pemanasan global yang memicu berbagai risiko, seperti mencairnya es di wilayah kutub, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, hilangnya terumbu karang, kekeringan, dan kegagalan panen (Mulyani, 2021). Pemanasan global dipengaruhi oleh peningkatan emisi karbon, dan sumber Gas Rumah Kaca di Indonesia yang berasal dari sektor FOLU, energi, pertanian, IPPU, dan limbah sebagaimana tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (Ndc, 2025). Di antara sektor-sektor tersebut, sektor energi menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, yang mencakup kelistrikan, pengolahan minyak dan batu bara, hulu migas, industri manufaktur, transportasi, bangunan, serta kegiatan lainnya, sehingga memiliki peran strategis dalam pasokan dan efisiensi energi (Febriananingsih, 2019). Secara nasional, sektor energi menyumbangkan sekitar 55% emisi, dengan target peningkatan bauran energi terbarukan sebesar 27–33% pada tahun 2035 serta puncak emisi pada tahun 2038 melalui percepatan pengembangan energi terbarukan dan pengurangan bertahap penggunaan batu bara (Ndc, 2025).

Kontribusi sektor energi pada tingkat lokal juga tergolong besar. Kabupaten Bojonegoro tercatat mengalami suhu tertinggi di Jawa Timur pada tanggal 28 Oktober 2023, yaitu mencapai 38,2°C, yang menunjukkan tingginya emisi Gas Rumah Kaca di wilayah tersebut. Emisi karbon di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari 3.631.687 ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2018 menjadi 5.670.451 ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2022, yang dihitung pada sektor energi, IPPU, AFOLU, dan limbah. Pada periode 2022–2024, sektor pengadaan dan penggunaan energi mengalami peningkatan tajam dari sekitar 27,6 juta ton CO<sub>2</sub>e menjadi 166,224 juta ton CO<sub>2</sub>e, seiring meningkatnya penggunaan energi berbahan bakar fosil serta aktivitas industri dan transportasi. Sektor IPPU juga meningkat dari 2,2 juta ton CO<sub>2</sub>e menjadi 5,55 juta ton CO<sub>2</sub>e akibat bertambahnya aktivitas industri manufaktur, sementara sektor limbah meningkat dari 21 ribu ton CO<sub>2</sub>e menjadi 124,145 ribu ton CO<sub>2</sub>e seiring pertumbuhan penduduk dan volume limbah. Sebaliknya, sektor AFOLU mengalami penurunan dari 5,7 juta ton CO<sub>2</sub>e menjadi 384,75 ribu ton CO<sub>2</sub>e, yang dapat dipengaruhi oleh restorasi lahan, peningkatan tutupan hutan, pengurangan konversi lahan, serta perbaikan metodologi perhitungan. Berdasarkan kondisi tersebut, Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon dirancang tidak hanya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat melalui berbagai upaya mitigasi, seperti Program Kampung Iklim, *Car Free Day*, pembibitan tanaman, biopori, desa hortikultura, desa berseri, dan bank sampah desa. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan rendah karbon dan mendukung target nasional menuju *Net Zero Emission* 2060.

Pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 13 yang menekankan urgensi mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari Agenda 2030. Agenda ini berasumsi bahwa kesejahteraan ekonomi, kemajuan sosial, dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat (Prabu Aji & Kartono, 2022). Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon sejalan dengan pendekatan berbasis komunitas sebagaimana diterapkan dalam Program Kampung

Iklim, meskipun tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan lokal, serta dukungan pemerintah. Secara yuridis, program ini juga sejalan dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement on Climate Change*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keterlibatan masyarakat muncul, berkembang, dan bertahan dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi masyarakat secara kontekstual (Hadi, 2020), serta menganalisis dinamika *Non Participation*, *Tokenism*, dan *Citizen Power* dalam kerangka *Ladder of Citizen Participation*. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan strategi pembangunan rendah karbon berbasis komunitas serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan tangga partisipasi Arnstein serta menganalisis dominasi dan pengaruh partisipasi tersebut terhadap keberlanjutan Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena partisipasi masyarakat dalam konteks kebijakan inovasi iklim secara mendalam, kontekstual, dan alami. Penelitian kualitatif berfokus pada makna dan interpretasi sosial terhadap suatu fenomena, bukan pada generalisasi statistik (Collins et al., 2021). Pendekatan studi kasus digunakan karena topik penelitian ini berfokus pada satu program spesifik yaitu Bojonegoro Peduli Emisi Karbon yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. Studi kasus dinilai tepat untuk mengeksplorasi secara detail bagaimana kebijakan inovatif ini diterapkan serta bagaimana masyarakat metanggapannya dalam jangka panjang (Handrian & Novita, 2025).

Menurut Robert K Yin dalam penelitian Nur'aini (2020), studi kasus cocok digunakan bila peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terhadap suatu fenomena yang kompleks dan kontekstual. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan merupakan bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung dalam jangka panjang, serta mengapa beberapa desa menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding lainnya. Pendekatan kualitatif juga sejalan dengan pandangan Denzin yang menyebutkan bahwa penelitian sosial harus

berangkat dari pemahaman terhadap pengalaman dan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penelitian, sejalan dengan semangat partisipasi publik yang menjadi inti dari kebijakan inovasi lingkungan (Selvia et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada beberapa desa pelaksana program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon, dikarenakan kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang sudah berkontribusi terhadap kebijakan global *Net Zero Emission* berupa penganjuran Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Desa yang dipilih mencerminkan desa yang berhasil mengikuti program dan desa yang belum mengikuti program. Kabupaten Bojonegoro dipilih karena memiliki tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup tinggi dibanding daerah sekitarnya. Berdasarkan Laporan Dinas Lingkungan Hidup DLH 2023, total emisi Kabupaten Bojonegoro meningkat dari 3.631.687 ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2018 menjadi 5.670.451 ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi inovatif dalam menekan laju peningkatan emisi, salah satunya melalui program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon. Populasi dalam penelitian ini mencakup pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program “Bojonegoro Peduli Emisi Karbon”, yang meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, aparat pemerintah desa pelaksana, kelompok masyarakat peduli lingkungan, serta warga yang ikut aktif dalam kegiatan pengurangan emisi karbon.

Populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini merupakan tokoh utama masyarakat desa yang mengikuti program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon di Kabupaten Bojonegoro. Pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian dengan mempertimbangkan tujuan tertentu, dengan jumlah delapan informan (Permana et al., 2020). Kriteria informan yang ditetapkan antara lain:

1. Tokoh masyarakat, pengurus kelompok lingkungan, atau penggerak komunitas lokal yang tinggal di desa atau kelurahan yang menjadi pelaksana program.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang benar benar paham tentang program yang dicanangkan.
4. Mereka yang bersedia dan sanggup dimintai wawancara.

Metode *Purposive Sampling* ini dipilih agar peneliti memperoleh data yang mendalam, valid, dan sesuai dengan kebutuhan fenomena analisis partisipasi masyarakat jangka panjang dalam konteks kebijakan inovasi lingkungan di Kabupaten Bojonegoro. Menurut (Sugiyono, 2020), jenis data dalam penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci. Informan terdiri dari:
  - a) Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

- b) Kepala Desa dan perangkat desa pelaksana program.
- c) Tokoh masyarakat atau kelompok pelaksana kegiatan lingkungan.
2. Data Sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti:
  - a) Second NDC 2025.
  - b) Laporan Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon.
  - c) Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bojonegoro.
  - d) Artikel ilmiah, jurnal kebijakan publik, dan literatur tentang inovasi kebijakan lingkungan.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman informan terkait partisipasi pelaksanaan program secara bebas (Nurhaswinda, 2025). Panduan wawancara disusun berdasarkan tiga konstruk utama tangga partisipasi : *Non Participation, Tokenism, dan Citizen Power* Observasi Partisipatif.
2. Observasi dilakukan di lokasi kegiatan program seperti tempat pengolahan sampah, kebun penghijauan desa, dan kegiatan pelatihan lingkungan. Observasi memungkinkan peneliti memahami perilaku nyata masyarakat dan sejauh mana partisipasi mereka berlangsung secara aktif (Prayuda et al., 2025).

Kombinasi kedua teknik ini bertujuan menciptakan triangulasi data, yang menurut Denzin (2011) dalam penelitian (Bahiyah & Gumiandari, 2024) merupakan strategi penting penelitian kualitatif untuk meningkatkan keabsahan hasil.

Teknik analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12 pro . NVivo merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk menganalisis data (Rohmadi et al., 2024). Dengan menggunakan NVivo, peneliti kualitatif dapat melakukan pengkodean analitis terhadap data dengan cara yang efisien dan efektif. Kode itu sendiri merupakan kata atau frasa singkat yang secara simbolis memberikan atribut ringkas, menonjol, dan menangkap inti dari data yang berbasis bahasa atau visual (Endah et al., 2020). Menurut Muliana et al (2023) Dalam Nvivo ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mengolah data, yaitu:

1. *Coding*, Dalam analisis data kualitatif, *Coding* atau pengkodean merujuk pada penggunaan kata atau frasa singkat yang sering muncul untuk secara simbolis menyajikan ringkasan, inti, atau kesimpulan dari isu pokok dalam data. Proses ini membantu mengidentifikasi pola dan atribut penting yang berkaitan dengan data bahasa maupun visual. Jenis data yang dapat dianalisis mencakup transkrip wawancara, catatan observasi partisipatif, jurnal, dokumen, serta literatur relevan lainnya.
2. *Analytical Map*, merupakan tahapan penyusunan diagram yang memetakan ide-ide utama penelitian. Tahapan ini digunakan untuk merekam pemikiran peneliti dan menggambarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Diagram tersebut terdiri dari beberapa node yang telah diberi kode, di mana sumber data yang relevan dicantumkan pada masing-masing node.

3. *Matrix Coding Query*, menghasilkan informasi dalam bentuk tabel yang menunjukkan atribut data yang telah melalui proses *Coding* pada dua atau lebih node secara simultan. Fitur ini membantu peneliti mengidentifikasi hubungan antar kategori atau tema.
4. *Framework Matrices*, merupakan bentuk penyajian data dalam NVivo 12 Pro yang disusun dalam format tabel dan dapat diekspor ke Excel. Fitur ini memungkinkan peneliti menyajikan ringkasan data secara sistematis dan terstruktur berdasarkan sumber data maupun kategori analisis.

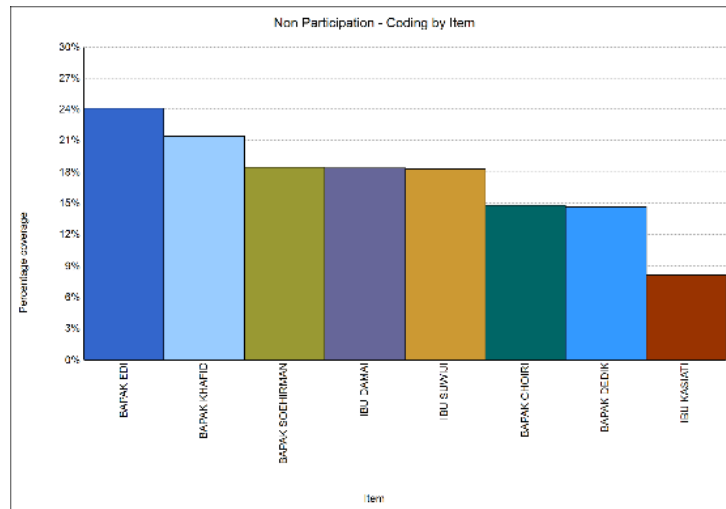
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengenai tangga partisipasi masyarakat dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon dianalisis menggunakan teori tangga partisipasi Arnstein yang terdiri atas tingkatan *Non Participation*, *Tokenism*, dan *Citizen Power*. Ketiga tingkatan ini menggambarkan tingkatan partisipasi yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh ruang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, serta interpretasi data menggunakan NVivo 12 Pro.

*Non Participation* menggambarkan sejauh mana para informan merasa tidak dilibatkan atau tidak memperoleh ruang partisipasi dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon. Tangga *Non Participation*, khususnya pada indikator *Manipulation*, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa masyarakat kerap menerima informasi mengenai Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon hanya dalam bentuk ajakan tanpa penjelasan yang mendalam. Bapak Edi sebagai masyarakat yang memiliki persentase tertinggi di tangga *Non Participation* menjelaskan bahwa informasi biasanya disampaikan melalui ketua RT dan masyarakat hanya diberikan informasi bahwa akan ada kegiatan tertentu, kemudian dikumpulkan di balai desa untuk mendapatkan penjelasan garis besar program. Penjelasan yang diterima pun masih bersifat umum dan belum menyentuh detail tujuan maupun manfaat program. Sedangkan disampaikan oleh Ibu Kasiati dengan nilai persentase terendah pada tangga *Non Participation* mengatakan bahwa informasi program diberikan oleh pemerintah desa melalui RT dan langsung kepada masyarakat, namun tetap dalam bentuk penyampaian sepintas tanpa uraian yang komprehensif.

Aspek keterlibatan, kedua informan menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi dibanding aktor yang terlibat aktif dalam proses perumusan kegiatan. Bapak Edi memberikan contoh bahwa masyarakat memang dilibatkan dalam kegiatan seperti penanaman pohon melibatkan beberapa RT namun bentuk partisipasinya lebih bersifat pelaksanaan teknis sesuai arahan pemerintah desa. Ibu Kasiati juga menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan, tetapi sifat keterlibatannya tetap berada pada posisi menerima arahan yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator *Therapy*, kedua informan mengungkapkan adanya upaya pemerintah desa untuk membentuk kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan tersebut antara lain berupa ajakan penanaman tanaman penghijauan, kerja sama dengan kelompok PKK, serta imbauan rutin mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan pencegahan genangan air. Meskipun masyarakat memiliki ruang untuk memberikan saran misalnya mengenai jenis tanaman yang cocok atau teknik perawatan namun ruang tersebut tetap berada dalam batasan program yang telah ditetapkan pemerintah desa. Dengan demikian, ruang pendapat masyarakat memang tersedia, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan keterlibatan yang independen.



Gambar 1 Interpretasi Data Indikator *Non Participation*.

Sumber : Nvivo 12 Pro, 2025

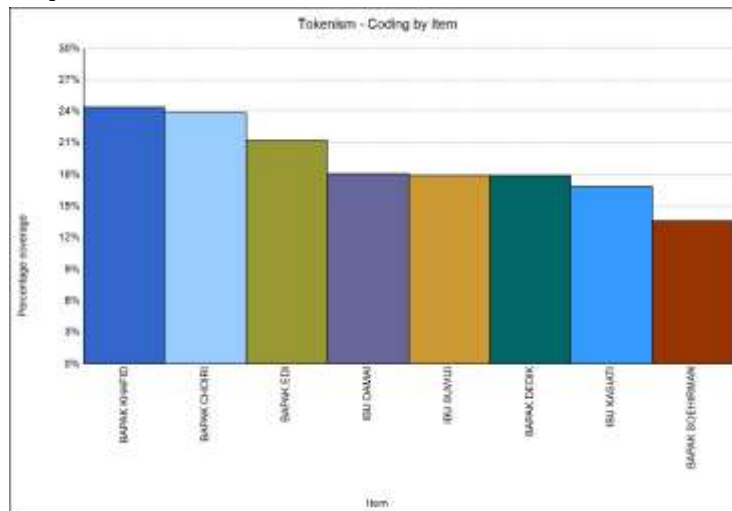
Grafik, Bapak Edi memiliki persentase tertinggi yaitu 24%, yang menunjukkan bahwa beliau paling sering menyampaikan bahwa masyarakat tidak diberi penjelasan mendalam dan umumnya hanya menerima informasi sepintas dari perangkat desa. Bapak Khafid berada pada posisi kedua dengan 22%, yang berarti masyarakat cenderung hanya menjadi penerima informasi tanpa kesempatan berdiskusi atau memberikan masukan. Bapak Soehirman, Ibu Damai, dan Ibu Suwiji masing-masing memperoleh 19%, menandakan adanya pola komunikasi yang masih *top-down* dari pemerintah. Selanjutnya, Bapak Choiri dan Bapak Dedik dengan 17% menunjukkan bahwa meskipun informasi tetap diberikan, penyampaiannya masih terbatas. Adapun Ibu Kasiati dengan persentase 9% menggambarkan bahwa pada kasus tertentu terdapat komunikasi dua arah yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriani et al (2021) yang menyatakan bahwa pada banyak program pembangunan berbasis pemerintah, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat *Non Participation*, terutama pada tahap awal implementasi. Pola penyampaian informasi yang bersifat *top-down* dan minimnya ruang dialog menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai penerima kebijakan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran lingkungan belum sepenuhnya diiringi dengan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

*Tokenism* merupakan kondisi ketika masyarakat diberi ruang berpartisipasi, namun hanya bersifat formal dan tidak benar-benar memengaruhi keputusan. Pada tangga *Tokenism*, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membuka akses informasi dan ruang komunikasi bagi masyarakat, namun bentuk partisipasi tersebut belum sepenuhnya memberi pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Bapak Khafid dengan nilai persentase tertinggi menjelaskan bahwa mekanisme Informing dilakukan melalui berbagai saluran, seperti rapat desa, pertemuan RT, kegiatan rutin, hingga media online berupa website dan grup WhatsApp desa. Pola penyampaian informasi ini menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam menyebarkan informasi program. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan memberikan umpan balik melalui survei online, forum warga, maupun penyampaian pendapat melalui ketua RT.

*Consultation*, dilakukan dengan meminta masyarakat menyampaikan pendapat melalui usulan dari tingkat RT hingga desa. Tindak lanjut usulan ditentukan oleh prioritas dan urgensi kebutuhan, sehingga sebagian aspirasi tidak diakomodasi. *Placation* melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, lembaga desa, dan warga dalam forum perencanaan. Keputusan akhir tetap berada pada pemerintah desa dan disesuaikan dengan prioritas program yang lebih tinggi.

Bapak Soehirman dengan persentase paling rendah menunjukkan pola *Tokenism* yang tercermin dari minimnya pengaruh masyarakat terhadap keputusan program. Pada tahap Informing, program disampaikan melalui tatap muka dan media desa, sementara umpan balik diberikan melalui pengawasan web, grup WhatsApp, atau ketua RT. Pada aspek *Consultation*, masukan masyarakat disampaikan secara *bottom-up*, namun tindak lanjutnya tetap disesuaikan dengan urgensi serta keselarasan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat *Placation*, meskipun perwakilan masyarakat dilibatkan secara luas, pengaruh mereka tetap sangat terbatas dan hanya menjadi bahan pertimbangan. Secara keseluruhan, dimensi *Tokenism* menunjukkan adanya ruang komunikasi dan partisipasi, namun masih sebatas penyampaian informasi dan penghimpunan aspirasi yang belum sepenuhnya memengaruhi keputusan.



**Gambar 2 Interpretasi Data Indikator *Tokenism***

Sumber : Nvivo 12 Pro, 2025

Grafik, Bapak Khafid memperoleh persentase tertinggi yaitu 25%, yang menunjukkan bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, tetapi beberapa pendapat tidak ditindaklanjuti. Bapak Choiri dengan 24% menandakan bahwa masyarakat hadir dalam forum, namun keterlibatannya belum substantif. Bapak Edi memperoleh 21%, yang berarti masyarakat dapat menyampaikan pendapat tetapi ruang dialog masih terbatas. Selanjutnya, Ibu Damai, Ibu Suwiji, dan Bapak Dedik masing-masing 19%, menunjukkan bahwa sebagian pendapat masyarakat mendapat tanggapan. Terakhir, Ibu Kasiati 18% dan Bapak Soehirman 14% menunjukkan bahwa pengaruh perwakilan masyarakat terhadap keputusan program masih sangat kecil.

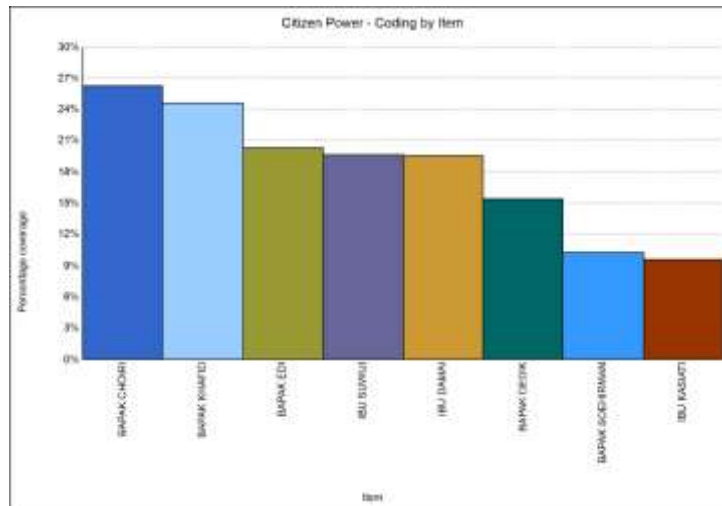
Hasil ini konsisten dengan temuan Erlina (2025) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan sering kali hanya bersifat simbolis apabila tidak disertai kewenangan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi pada tingkat *Tokenism* cenderung menciptakan ilusi keterlibatan, namun belum mampu mendorong perubahan kebijakan secara substantif. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan kapasitas masyarakat, dominasi peran pemerintah desa, serta orientasi program yang masih berfokus pada pencapaian target administratif.

*Citizen Power* merupakan tingkatan partisipasi tertinggi, di mana masyarakat memiliki kapasitas mengambil keputusan dan mengontrol program. *Citizen Power*, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dan persepsi antara informan mengenai tingkat kewenangan dan kendali masyarakat dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon. Bapak Choiri dengan nilai persentase tertinggi menggambarkan bahwa masyarakat telah memiliki ruang yang lebih besar untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menentukan langkah program. Pada indikator *Partnership*, ia menyatakan bahwa masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, bahkan pemerintah desa terlibat secara langsung dalam menjalankan program. *Delegated Power*, Bapak Choiri menjelaskan bahwa lingkungan diberi kewenangan tertentu untuk mengelola kegiatan, meskipun tetap berada dalam aturan yang telah disepakati bersama. Penyampaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran operasional dalam menjalankan sebagian aktivitas program dengan dukungan dan koordinasi dari pemerintah desa. Proses pelaksanaan disebut berjalan lancar karena tetap ada pendampingan dari pihak pemerintah desa. Pada indikator *Citizen Control*, Bapak Choiri mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki hak penuh dalam menentukan arah kebijakan lingkungan, termasuk dalam pengawasan program yang dilakukan melalui kesadaran kolektif menjaga lingkungan, serta tetap mendapat dorongan dari pemerintah desa dalam memastikan keberlanjutan kegiatan.

Ibu Kasiati dengan nilai persentase terendah memberikan gambaran yang lebih rendah terhadap tingkat kendali masyarakat dalam program. Pada tingkat *Partnership*, ia menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam proses penentuan langkah atau kegiatan program, melainkan hanya menerima arahan dari pemerintah tanpa adanya kerja sama yang seimbang. Pada *Delegated Power*, meskipun

masyarakat melaksanakan beberapa kegiatan secara mandiri, ia menegaskan bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatur atau mengambil keputusan dalam program. Bahkan pelaksanaan kegiatan mandiri tersebut dilakukan tanpa adanya evaluasi lapangan secara langsung dari pemerintah.

*Citizen Control*, Ibu Kasiati menyebut bahwa masyarakat tidak memiliki hak penuh dalam menentukan kebijakan program lingkungan. Pengawasan atau evaluasi pun masih bergantung pada dorongan pemerintah desa agar masyarakat tetap peduli lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mencapai tingkat kendali penuh sebagaimana karakteristik *Citizen Power*, tetapi masih berada pada tingkat partisipasi yang bersifat mengikuti arahan pemerintah. Secara keseluruhan, narasi dari kedua informan memperlihatkan bahwa tingkat *Citizen Power* belum terwujud secara merata. Bapak Choiri menggambarkan adanya ruang kendali yang lebih besar bagi masyarakat, sedangkan Ibu Kasiati menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada posisi menerima arahan dan belum memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan program.



**Gambar 3 Interpretasi Data Indikator *Citizen Power***

Sumber : Nvivo 12 Pro, 2025

Data pada grafik Bapak Choiri memiliki nilai persentase tertinggi yaitu 26% yang berarti masyarakat berperan aktif dan memiliki pengaruh pada program, Bapak Khafid memiliki nilai persentase 25% yang berarti adanya keterlibatan masyarakat dalam koordinasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program, Bapak Edi memiliki nilai persentase 20% yang berarti adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, Ibu Suwiji dan Ibu Damai memiliki nilai persentase 19% yang berarti masyarakat berhak melaksanakan program secara mandiri, Bapak Dedik memiliki nilai persentase 16% yang berarti masyarakat menjalankan program mandiri tanpa intervensi pemerintah, Bapak Soehirman memiliki nilai persentase 10% yang berarti memiliki peran mengevaluasi namun tidak mendominasi keputusan pemerintah, Ibu Kasiati memiliki nilai persentase 9% yang berarti keterlibatan masyarakat sebagai peserta aktif bukan pengambil keputusan.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Natalia & Arbi (2025) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat mencapai tingkat *Citizen Power*

secara merata apabila didukung oleh pendampingan intensif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh konteks lokal, tingkat kesiapan masyarakat, serta durasi implementasi program yang masih relatif baru di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, *Citizen Power* dalam program ini masih bersifat parsial dan belum terdistribusi secara merata.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon secara umum masih berada pada tingkat *Tokenism*, di mana masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan forum program, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang berlangsung cenderung bersifat formal dan prosedural, sehingga peran masyarakat lebih dominan sebagai pelaksana kegiatan dibandingkan sebagai penentu arah kebijakan. Meskipun demikian, temuan penelitian juga mengindikasikan adanya potensi pergeseran tingkat *Citizen Power* pada sebagian masyarakat, terutama yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan intensitas keterlibatan lebih tinggi dalam kegiatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program mitigasi perubahan iklim dapat berkembang secara lebih substantif apabila didukung oleh mekanisme kolaborasi yang setara, kejelasan pembagian peran, serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

penguatan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya membuka keterlibatan ruang, tetapi juga memberikan kewenangan yang lebih nyata kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting agar Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pencapaian target *Net Zero Emission* di Kabupaten Bojonegoro.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bahiyah, U., & Gumindari, S. (2024). Metode Penelitian. In *General And Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Petukangan Utara. 167–186.
- Endah, P. T., Wilujeng, S. A., Rifka, F., Achmad, S., & Imbalan, Z. (2020). Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif. *Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif*, 1–125.
- Erlina, F. (2025). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Komunitas Perempuan Di Desa *Jurnal*

- Humaniora Dan Sosial Sains, 2(2).  
<https://Humaniorasains.Id/Jhss/Article/View/157%0ahttps://Humaniorasains.Id/Jhss/Article/Download/157/172>
- Febriananingsih, N. (2019). Tata Kelola Energi Terbaru Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional. *Majalah Hukum Nasional*, 2(4), 29–56.
- Hadi, I. P. (2020). Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah- Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/ Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik). In *Penelitian Media Kualitatif*.
- Handrian, E., & Novita, M. (2025). Adopsi Inovasi Kebijakan Digital Yang Inklusif: Studi Kasus Aplikasi Sipintar Peduli Di Kota Pekanbaru. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 105–119.  
<https://doi.org/10.25299/jiap.2025.21882>
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy And Management Review (Dpmr)*, 57–67.  
<https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.18597>
- Muliana, Nurbaiti, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (Scf) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246.  
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)
- Mulyani, A. S. (2021). Oleh Agnes Sri Mulyani. *Pemanasan Global, Penyebab, Dampak Dan Antisipasinya*.
- Natalia, S., & Arbi, M. (2025). Dinamika Keberhasilan Program Bertani Untuk Negeri Di Kecamatan Gekbrong Dalam Perspektif Persepsi Dan Partisipasi. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(2), 3123. <https://doi.org/10.25157/ma.v11i2.18798>
- Ndc, S. (2025). *Second Ndc - Indonesia Komitmen Iklim Post-2030 Ini Bukan Langkah Pertama Indonesia*.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *Inersia: Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Nurhaswinda, R. F. S. A. (2025). Perbandingan Pendekatan Kualitatifdan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, Vol. 26(No. 1), 213–222. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1759>
- Permana, A. K., Samodra, H., & Kurworo, A. (2020). *Buku Panduan Penetapan Warisan Geologi (S. Permanadewi & S. Maryanto (Eds.); 1st Ed., Issue 1)*. Pusat Survei Geologi.
- Prabu Aji, S., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal Of Social Research*, 1(6), 507–512.  
<https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>
- Prayuda, M. S., Nainggolan, D. M., & ... (2025). *Kegiatan Kebersihan Lingkungan Secara*

Gotong Royong Serta Pembuatan Taman Di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Jurnal, 1–8. <https://Ejournal.Pustakakaryamandiri.Com/Ojs/Index.Php/Jppm/Article/View/108%0ahttps://Ejournal.Pustakakaryamandiri.Com/Ojs/Index.Php/Jppm/Article/Download/108/80>

Rohmadi, Doni Yusuf Bagaskara, & Indah Yuliana. (2024). Analisis Swot Perkembangan Dana Haji Di Indonesia : Studi Pendekatan Nvivo Dan Literatur Review. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 12(1), 97–114. <https://Doi.Org/10.37812/AlIqtishod.V12i1.1463>

Selvia, S. I., Danasari, I. F., Fitri, N., Maulin, Sukma, L. H., Pratama, M. G., & Akbar, Z. I. A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekarsari Lombok Barat Melalui Perencanaan Desa Berbasis Participatory Rural Appraisal (Pra). *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1303–1310.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

Zahira, N. P., & Fadillah, D. P. (2022). Pemerintah Indonesia Menuju Target Net Zero Emission ( Nze ) Tahun 2060 Dengan Variable Renewable Energy ( Vre ) Di Indonesia. 2(2), 114–119.